

## KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI

<sup>1</sup>Prasetyo Fitri Rizki  
<sup>2</sup>Mohammad Abdul Mukhy

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Depok  
<sup>2</sup>mukhyi@staff.gunadarma.ac.id

### ABSTRACT

*Granting autonomy to the Local Government is a must. In addition to the result of internal pressure area who want their own independence and democratization of a region, is also an answer to enter the era of globalization is increasingly widespread. The objective of this research is to find out how local government performance from several aspects such as level of financial independence, effectiveness and efficiency of the income of local own revenues, the level of development expenditure, revenue forecasting the income of local own revenues and local shopping development by using the double Exponential smoothing method, and the contribution of income to the original area Bekasi City shopping regional development, and also whether it has both a significant contribution or not. From the results of this research can be drawn the conclusion that the level independence of regional autonomy Bekasi still low, the level of effectiveness is quite good in the last 5 years and the level of efficiency of local government Bekasi still less efficient, the level of activity is quite good in allocating funds for development expenditure, the results of forecasting method with double Exponential smoothing is a equation  $Y_t = 86464445951.56 + n 22895202794.12$  for the income of local revenues and  $Y_t = 329559989652.875 + n 69110120732.25$  for development Shopping, and there is a significant contribution from the income of the income of local revenues to Shopping Regional Development.*

*Keywords : Contributions, The income of local revenues, Shopping Regional Development, autonomy.*

### PENDAHULUAN

Berdasarkan pada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang kemudian di perbaharui dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta Undang-Undang No.25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dimana Undang-Undang tersebut memiliki misi utama yaitu desentralisasi. TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah,

Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan Serta Perimbangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang menjadi titik awal dari serangkaian reformasi kelembagaan dalam mencapai *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efisien, efektif, transparan, responsif dan akuntabel.

Dewasa ini daerah-daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan

mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan. Tanpa pelimpahan ini, otonomi daerah menjadi tidak bermakna. Salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan adalah besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), makin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, makin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, dan begitu pula sebaliknya.

Pembahasan bertujuan untuk :  
(a) Mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bekasi,  
(b) Mengetahui Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi,  
(c) Mengetahui tingkat belanja pembangunan terhadap APBD kota Bekasi,  
(d) Mengetahui peramalan pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan daerah dengan menggunakan metode *double exponential smoothing*,  
(e) Mengetahui kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja pembangunan Kota Bekasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menjadikan Pemerintah Daerah Kota Bekasi khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Bidang Anggaran yang berlokasi di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Bekasi sebagai Objek penelitian

Penulis menggunakan data-data yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi berupa Laporan Pendapatan asli daerah Pada Periode 2004 sampai 2008 dan Laporan Belanja Daerah pada periode 2004 sampai 2008. Dan penulis

juga menggunakan variabel tidak bebas atau *dependent* (variabel Y) yaitu belanja pembangunan, sedangkan variabel bebas atau *independent* (variabel X) yaitu pendapatan asli daerah.

Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan dengan penelitian lapangan secara langsung melalui pengamatan dan wawancara. Serta peneliti juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan membaca buku acuan, artikel yang berhubungan dengan materi penulisan.

Dalam penelitian ini menggunakan Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD, Rasio tingkat belanja pembangunan (Abdul Halim 2008 : 232), peramalan pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan daerah dengan menggunakan metode *double exponential smoothing* (Purbayu Budi Santosa 2005 : 204), serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja pembangunan Kota Bekasi dan juga apakah kedua hal tersebut mempunyai kontribusi yang signifikan atau tidak dengan menggunakan uji regresi sederhana (uji t) (Bhuono Agung Nugroho 2005 : 54).

## PEMBAHASAN

### Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa kemandirian daerah Kota Bekasi dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih rendah. Bahkan mengalami kecenderungan turun. Hal ini di buktikan dengan hasil perhitungan pada tahun 2004 rasio kemandirian daerah sebesar 18,04%. Pada tahun 2005 meningkat menjadi 20,79%. Pada tahun 2006 menurun menjadi 19,49%. Pada tahun

2007 kembali mengalami penurunan menjadi 18,22%. Bahkan pada tahun 2008 rasio kemandirian daerah mengalami penurunan menjadi 17,62% yang merupakan rasio kemandirian daerah terendah dalam 5 tahun terakhir.

### **Perhitungan Rasio Efektivitas dan Efisiensi**

Dari perhitungan dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas Pemerintah Kota Bekasi dalam merealisasikan Pendapatan asli daerah yang di rencanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah secara keseluruhan dalam 5 tahun sudah cukup baik meskipun tidak terlalu baik pada tahun 2004. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan pada tahun 2004 rasio efektivitas Kota Bekasi sebesar 99,82 % yang merupakan rasio yang tidak terlalu baik karena tidak mencapai nilai 1 atau 100% sebagai kategori efektif. Pada tahun 2005 tingkat rasio efektivitas mengalami peningkatan menjadi sebesar 103,52 % dan dapat dikategorikan efektif. Pada tahun 2006 tingkat rasio efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 101,79 % namun masih dapat dikategorikan cukup efektif. Tahun 2007 tingkat rasio efektivitas mengalami peningkatan menjadi sebesar 102,86 % dan dapat dikategorikan efektif. Pada tahun 2008 rasio efektivitas kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 106,23% yang merupakan rasio tertinggi dalam 5 tahun terakhir yang menandakan semakin baik atau efektifnya kinerja pemerintah daerah.

Dari perhitungan dapat dilihat rasio efisiensi yang menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam perbandingan besarnya belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2004 hingga tahun anggaran 2008. Pada tahun 2004 rasio efisiensi sebesar 93,71 % yang

masuk dalam kategori kurang efisien. Pada tahun 2005 rasio efisiensi menurun menjadi sebesar 99,81 % dan masih dalam kategori kurang efisien bahkan menjadi yang terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2006 rasio efisiensi sedikit meningkat menjadi 98,74 % dan masuk ke dalam kategori kurang efisien. Tahun 2007 rasio efisiensi kembali meningkat menjadi sebesar 92,65 % yang merupakan rasio efisiensi tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir namun masih masuk ke dalam kategori kurang efisien. Pada tahun 2008 tingkat rasio efisiensi kembali menurun menjadi sebesar 99,23 % dan masih masuk ke dalam kategori kurang efisien. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa secara garis besar kinerja pemerintah daerah Kota Bekasi kurang efisien dalam merealisasikan belanja daerah.

### **Perhitungan Rasio Aktivitas**

Dari perhitungan diatas dapat dilihat perubahan rasio aktivitas dari tahun anggaran 2004 hingga tahun anggaran 2008. Dimana pemerintah daerah Kota Bekasi sudah cukup baik dalam mengalokasikan dananya untuk belanja pembangunan, karena persentase belanja pembangunan sudah melebihi setengah dari total APBD Kota Bekasi yaitu lebih dari 50%. Hal tersebut dapat dibuktikan pada tahun 2004 Rasio aktivitas pada belanja rutin sebesar 39,35% dan belanja pembangunan 60,65%. Pada tahun 2005 rasio belanja rutin mengalami penurunan menjadi sebesar 36,42% dan rasio belanja pembangunan mengalami peningkatan menjadi sebesar 63,58%. Tahun 2006 rasio belanja rutin kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 35,10% dan rasio belanja pembangunan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 64,90%. Pada tahun 2007 rasio belanja rutin mengalami peningkatan menjadi

sebesar 46,70% dan rasio belanja pembangunan mengalami penurunan menjadi sebesar 53,30%. Tahun 2008 rasio belanja rutin kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 48,95% dan rasio belanja pembangunan kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 51,05%.]

### **Peramalan Pad dan Belanja Pembangunan dengan Double Exponential Smoothing**

Dari perhitungan menggunakan SPSS dengan metode double exponential smoothing yang hasil yang peneliti dapat adalah :

Level dasar dari grafik double exponential smoothing adalah 86464445951,56 sedangkan trend untuk pendapatan asli daerah adalah 22895202794,12. Persamaan prediksi untuk pendapatan asli daerah Kota Bekasi adalah :

$$Y_t = 86464445951,56 + n \cdot 22895202794,12$$

Di mana : Y adalah pendapatan asli daerah Kota Bekasi pada tahun ke- t dan T adalah tahun

Dari perhitungan menggunakan SPSS dengan metode *double exponential smoothing* yang hasil yang peneliti dapat adalah :

Level dasar dari grafik *double exponential smoothing* adalah 329559989652,875 sedangkan trend untuk Belanja Pembangunan adalah 69110120732,25. Persamaan prediksi untuk pendapatan asli daerah Kota Bekasi adalah :

$$Y_t = 329559989652,875 + n \cdot 69110120732,25$$

Di mana : Y adalah Belanja pembangunan Kota Bekasi pada tahun ke- t dan T adalah tahun

### **Perhitungan Kontribusi Pad Terhadap Belanja Pembangunan**

Dari hasil perhitungan dapat dilihat besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja pembangunan daerah dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Pada tahun 2004 kontribusi PAD sebesar 26,81%. Tahun 2005 kontribusi PAD naik menjadi sebesar 27,12%. Tahun 2006 Kontribusi PAD mengalami penurunan menjadi sebesar 25,46%. Pada tahun 2007 kontribusi PAD mengalami peningkatan menjadi 31,14%. Dan pada tahun 2008 kontribusi PAD kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 29,58%. Rata-rata Kontribusi PAD terhadap belanja pembangunan selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 28,02% yang berarti kemampuan PAD belum cukup dalam menutupi belanja pembangunan daerah Kota Bekasi sehingga Pemerintah Kota Bekasi masih mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk menutupi belanja pembangunan Kota Bekasi.

Oleh karena nilai t hitung > t tabel (4,968 > 3,182) maka H<sub>0</sub> ditolak, artinya bahwa Terdapat Kontribusi yang Signifikan dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pembangunan Daerah.

### **PENUTUP**

1. Dari perhitungan dengan menggunakan rasio kemandirian daerah dapat diketahui bahwa kemandirian daerah Kota Bekasi dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih rendah. Bahkan mengalami kecenderungan turun.

2. Dari perhitungan dengan menggunakan rasio efektivitas dapat diketahui bahwa bahwa tingkat efektivitas Pemerintah Kota Bekasi dalam merealisasikan Pendapatan asli daerah yang di rencanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah secara keseluruhan dalam 5 tahun

sudah cukup baik meskipun tidak terlalu baik pada tahun 2004. Dan dengan rasio efisiensi dapat diketahui bahwa secara garis besar kinerja pemerintah daerah Kota Bekasi kurang efisien dalam merealisasikan belanja daerah. Karena Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam melakukan pengeluarannya masih besar bahkan pengeluarannya hampir sebanding dengan penerimaannya yang menandakan pemerintah daerah tidak dapat melakukan penghematan anggaran.

3. Dari perhitungan dengan menggunakan rasio aktivitas dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Kota Bekasi sudah cukup baik dalam mengalokasikan dananya untuk belanja pembangunan, karena persentase belanja pembangunan sudah melebihi setengah dari total APBD Kota Bekasi yaitu lebih dari 50%.

4. Peramalan PAD dan belanja pembangunan dengan metode *double exponential smoothing* Kota Bekasi pada tahun 2004 hingga tahun 2008 adalah:

1. Level dasar dari grafik *double exponential smoothing* adalah 86464445951,56 sedangkan trend untuk pendapatan asli daerah adalah 22895202794,12. Persamaan prediksi untuk pendapatan asli daerah Kota Bekasi adalah :

$$Y_t = 86464445951,56 + n \cdot 22895202794,12$$

2. Level dasar dari grafik *double exponential smoothing* adalah 329559989652,875 sedangkan trend untuk Belanja Pembangunan adalah 69110120732,25. Persamaan prediksi untuk pendapatan asli daerah Kota Bekasi adalah :

$$Y_t = 329559989652,875 + n \cdot 69110120732,25$$

5. Rata-rata Kontribusi PAD terhadap belanja pembangunan selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 28,02%

yang berarti kemampuan PAD belum cukup dalam menutupi belanja pembangunan daerah Kota Bekasi sehingga Pemerintah Kota Bekasi masih mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk menutupi belanja pembangunan Kota Bekasi. Dan dalam pengujian signifikansi dengan menggunakan uji-t dapat diketahui bahwa bahwa Terdapat Kontribusi yang signifikan dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pembangunan Daerah.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam membantu memberikan alternatif pemecahan masalah yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kota Bekasi hendaknya mengoptimalkan upayanya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan Kota Bekasi dengan cara program ekstensifikasi dan intensifikasi, caranya:
  - a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia (Pegawai pemerintahan) khususnya yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah agar PAD dapat lebih ditingkatkan.
  - b. Lebih menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Kota Bekasi. dan mencari potensi-potensi baru agar potensi tersebut dapat di maksimalkan guna menambah pemasukan daerah.
  - c. Agar PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi bertambah sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Bekasi melaksanakan penyempurnaan dan pembaharuan mengenai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi tentunya disesuaikan dengan kondisi

- perekonomian dan masyarakat Kota Bekasi.
- d. Menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
2. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini, Pemerintah Daerah Kota Bekasi sebaiknya memperhatikan penulisan ini agar menjadi pertimbangan ke depan. Khususnya menggunakan peramalan metode *double exponential smoothing* sehingga Pemerintah daerah dapat meramalkan PAD dan Belanja pembangunan untuk tahun-tahun berikutnya yang dapat dijadikan patokan dalam menyusun APBD di tahun-tahun ke depan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bahtiar, Arif, Muchlis, dan Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- [2] Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPF, Yogyakarta.
- [3] Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- [4] Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi, Rahmawati Maulidah. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- [5] Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*, Edisi 1. ANDI, Yogyakarta.
- [6] Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI, Yogyakarta.
- [7] Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI, Yogyakarta.
- [8] Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- [9] Santosa, Purbayu Budi. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*, Edisi 1. ANDI, Yogyakarta.
- [10] Sumtaky, Maxion. 2001. *Implementasi akuntansi Keuangan Daerah pada Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi, Jakarta.